

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan, 2005. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosionlogis), PT Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Achmad Ruslan, 2013, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Grafindo.
- Andi Hamzah, 2004. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika.
- Azis Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bagir Manan, 1997. Masalah Tata Negara Indonesia, Edisi II, Cetakan I, Alumni Bandung.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. Aspek-Aspek Perkembangan kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Yogyakarta : UII Press.
- Bambang Sutiyo, 2006. Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta : UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya.
- Berger, Peter L & Berger, Brigitte, 1976, Sociology: A Biographical Approach. Harmondsworth: Penguin Books.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2007. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya : CV. Kita.
- C.S.T. Kansil, 1983. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Curzon, L.B, 1979. Jurisprudence, M & E Handbook.

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Elwi Daniel, 2012. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ermashah Djaja, 2010. Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M. 1984. American Law : An Introduction, New York : W.W. Norton & Co.
- H.W.R. Wade, Administrative Law, Third Edition, (Oxford : Clarendon Press, 1971), p.6.
- Hans Kelsen, 2016. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media.
- Ian Mowalters, 2006. Memerangi Korupsi : Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, Surabaya : JPBooks.
- IGM Nurdjana, 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- International Conference Against Corruption, "Declaration Of The 8th International Conference Against Corruption", Lihat : Eddy O.S. Hiarej, dkk, 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Isbandi Rukminto Adi, 2005. Konsep dan Pokok Bahasan Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jakarta : UII Press.
- Ismail Suny, 1981. Mencari Keadilan, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jeremy Pope, 2003. Strategi Memberantas Korupsi, Jakarta : Yayasan
- Jimly Asshiddiqie, 2017, "Perihal Undang-Undang", PT. Raja Grafindo, Depok.
- John Rawls, 2006. A Theorie Of Justice-Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kaelan, 2008. Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Kamus Hukum Karya Fockema Andrea (1983) dalam : Andi Hamzah, 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Krishna Djaya Darumurti, 2016. Diskresi, Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks, Yogyakarta : Genta.
- Lubis M dan J.C. Scott, 1993. Korupsi Politik, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- M.W. Kusumah, 2001. Tegaknya Supremasi Hukum, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Misbahuddin Ahmad, 2010. Pendidikan Pancasila, Makassar : P3 Al-Univ. 45.
- Mohammad Mustari, 2017. Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, Depok: Raja Grafindo Perkasa.
- Muh. Djafar Saidi, dkk, 2017. Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muh. Tahir Ashary, 2015. Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsip dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta : Prenada Media Group.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Obor Indonesia.
- Oemar Seno Adji, 1980. Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta :Erlangga.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 2007. Hukum Responsip, Bandung : Nusamedia.
- Philippus Hardjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surayabaya :
- Rachmat Baro, 2010. Teori Hukum, Yogyakarta : Intan Cendekia.
- Romli Atmasasmita, 2004. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung : Mandar Maju.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1983. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia.
- Satjipto Rahardjo Dalam Antonius Sudirman, 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya; Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence), Kasus Hakim Bismar Siregar, Citra Aditya Bandung.

- Satjipto Rahardjo, 2009. Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum, Malang : Bayu Media.
- Satjipto Rahardjo, 2009. Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta : Ganta Publishing.
- SF. Marbun, 1997. Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, dalam Jurnal Fakultas Hukum UII, Yogyakarta : Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 6.
- Soenarjati Hartono, 1976. Apakah *The Rule of Law*tu ?.Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sri Soemantri, 1993. Tata Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 1977. Hukum Pidana 1, Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 1986. Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty.
- Sudikno MertoKusumo, 1996. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta : Liberty.
- Syukri Akub dan Badaruddin Badaru, 2012. Wawasan Dua Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Tahir Azhari, 1992. Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Jakarta : Bulan Bintang.
- Theo Huijbers, 1995. Filsafat Hukum, Cet. Keempat, Yogyakarta : Kanisius.
- Thomas Aquinas, 2002. Sebagaimana Dikutip oleh E. Sumaryono, Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Cet. Kesatu, Yogyakarta : Kanisius.
- Yunasril Ali, 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Zairin Harahap, 2002. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Raja Grafiik.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih, Bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korpsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. INTERNET

- [http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan dan jenisnya menurut para ahli.](http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli)
- [http://id.shvoong.com/law-and-politics/law2141316-pengertian aturan hukum.](http://id.shvoong.com/law-and-politics/law2141316-pengertian-aturan-hukum)
- [http://miftach.blog.uns.c.id/2009/10/arti peraturan hukum.](http://miftach.blog.uns.c.id/2009/10/arti-peraturan-hukum)
- <http://www.antikorupsi.org/id/ICW>, Januari Tahun 2017.

D. SUMBER LAIN

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bidang Pidana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Pan Muhammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Volume Nomor 1 (April 2009), Jakarta : MK RI.
- Rumusan Konvensi Hukum Tentang UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional, Maret 2018.
- Dalam FitriSKI Utami, Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Pelayanan Tugas Pelayanan Publik (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2007).
- Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia, dengan tema : "Meningkatkan Kualitas Pengadilan Dengan Kesamaan Persepsi Penerapan Hukum", di Palembang, Tgl 29 Oktober 2019.

- Muladi, Ambiguitas dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana : Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium, Simposium Hukum Pidana Nasional, yang diselenggarakan MAHUPIKI, di Makassar Tgl 18 Maret 2013.
- Disparitas Pidana (disparity of sentencing) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Vide : Molly Cheang, Disparity Of Sentencing, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977 sebagaimana dikutip Muladi dalam "Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya", dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana.
- Suwito, etc, 2017, "Deviation On Special Minimum Criminal Provision In The Verdict Of Corruption Court", International Journal Of Humanities and Social Science Invention, Volume 6 Issue 8, August 2017, hlmn. 14 The Ratification Of The UNCAC Convention 2003 is a national commitmen to improve Indonesia's national image in the international political arena.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Amiruddin Lannurung, S.H.,M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 5 April 1969.
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sukaria 1B No. 20 A Makassar.
Status : Menikah
Isteri : Andi Asri Juara, SE.
Anak :1. SitiNafilaNurulUtami Amiruddin
Mahasiswa Fak. Sastra Arab UMI.
2.Muh. Fauzan Azhima Putra Amiruddin
Mahasiswa Fakultas Hukum UMI.
Orang Tua :H.Lannurung (alm) dan Hj. Halijah (almh).

B. Riwayat Pekerjaan :

- Dosen Tetap Yayasan Universitas Indonesia Timur (UIT).
- Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Tahun 1990-an sampai sekarang.
- Mantan legal dan Penasihat Hukum Perusahaan Daerah Kota Makasar.
- Mantan pengacara perusahaan dan penyelesaian sengketa tripartit perusahaan, karyawan dan disnaker.
- entrepreneur

C. Riwayat Pendidikan :

- Strata Satu (S.1) Fakultas Hukum UMI Makassar Tahun 1989-1994.
- Strata Dua (S.2) Pascasarjana Unhas Tahun 2006-2008.
- Strata Tiga (S.3) Pascasarjana Unhas Tahun 2017 sampai sekarang.

D. Riwayat Organisasi :

1.Kemahasiswaan ;

- Mantan aktivis SEMA/BPM dan HMI Makassar Tahun 1989-1994.

2.Partai Politik ;

- MantanSekretaris PKBKec. Panakkukang, Kota Makassar,Tahun 1999-2000.

- Mantan Wakil Sekretaris dan Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Bulan Bintang Sulawesi Selatan Tahun 2000-2004.
- Mantan Dewan Pengurus Wilayah Partai Demokrat Sulawesi Selatan.

3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ;

Mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum DPC Partai Bulan Bintang Kota Makassar.

4. Kelslaman, Kemasyarakatan dan Ummat ;

- Ketua Yayasan Pengurus Masjid At-Taubah dan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Islam (P2A) AT-Taubah Kec. Panakkukang, Kota Makassar sampai Sekarang.
- Mantan Pengurus Persaudaraan Muslim (PPMS) Sedunia Propinsi Sulawesi Selatan.

E. Karya Ilmiah/jurnal :

1. ***Legal Analysis Of State Financial Losses Return In Corruption Crime Case In Indonesia (Journal of International Affairs and Global Strategi 2019).***
2. **Optimalisasi Pengaturan Hukum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (*Optimization of Legal Arrangements Regarding The Return of State Financial Losses in Cases of Criminal Acts of Corruption*), Jurnal Restorative Justice Vol 3, Nomor 2 Nopember 2019, Unmus Papua.**
3. **Pelaksanaan Supremasi Hukum Dalam Rangka Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Bertanggung Jawab Pada Lembaga Peradilan (Maleo Law Journal, Volume 5 Issue 1 April 2021 Unismuh Palu).**
4. **Penerapan Prinsip Profesionalisme Dalam Penegakan Hukum (Study Kasus Pengadilan Negeri Makassar) Jurnal Ilmiah Universitas Satria Makassar, Edisi XXI April 2014.**
5. **Beberapa Catatan Hukum Tentang Pengertian Kebijakan Administrasi Negara Berkenaan Dengan Pemamfaatan Tanah Terlantar Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 27 UUPA Tahun 1960 (Suatu Study Kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo) Jurnal Ilmiah Adiwidia Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Volume II No. 2 Edisi Juni 2012.**